

## **ABSTRAK**

Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana penggeroyokan membuat aparat kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam Tindak Pidana tertentu khususnya Tindak pidana penggeroyokan biasanya terjadi kekurangan alat bukti dan kesaksian sehingga di butuhkan suatu pemberkasan terpisah (*splitsing*), hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana pemberkasan terpisah (*splitsing*) oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam penanganan perkara penggeroyokan.

Permasalahan yang diangkat yaitu seperti diperlukannya pemberkasan terpisah (*splitsing*) dalam penanganan perkara penggeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, seperti apa pelaksanaan pemberkasan terpisah (*splitsing*) dalam penanganan perkara penggeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, seperti apa kendala dan solusi dalam pemberkasan terpisah (*splitsing*) dalam penanganan perkara penggeroyokan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan pemecahan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis dalam praktek, permasalahan diatas dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum.

Menurut hasil penelitian penulis, ternyata diperlukannya pemberkasan terpisah (*splitsing*) untuk memudahkan penyidik dalam kurangnya alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi, pelaksanaan dari pemberkasan terpisah diatur dalam Pasal 141 dan 142 KUHAP telah menyebutkan Penyidik dalam melakukan pemberkasan terpisah (*splitsing*) atas petunjuk Penuntut Umum, kendala dan solusi mengenai pemberkasan terpisah yang dilakukan penyidik yaitu terdapat kendala internal dan eksternal serta dalam solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya di Kepolisian dengan memberikan pelatihan dan evaluasi serta menjalin hubungan kerja sama dengan instansi lain.

Kata Kunci : *splitsing*, *Pengeroyokan*, *Penyidik*.

## **ABSTRACT**

The number of crimes committed by the community, especially criminal offenses, makes police officers namely investigators to conduct investigations. In particular criminal acts, especially criminal acts of mobility, there is usually a lack of evidence and testimony, so that a splits is needed, this makes the writer want to know how splits are made by police investigators in the big city resort of Semarang in handling mobbing cases.

The issues raised are such as the need for splits in handling cases of beatings in the Semarang City Police Resort, such as the implementation of splits in handling cases of beatings in the Semarang City Police Resort, what are the obstacles and solutions in separate filings splitsing in handling mobbing cases in Semarang City Police Resort.

The method used by the author in making this thesis is a method of empirical juridical approach, namely by doing problem solving by analyzing practical reality in practice, the above problem with the theory of legal certainty and law enforcement theory.

According to the results of the authors' research, it turns out that separate reporting is needed to facilitate investigators in the lack of evidence, especially evidence of witness testimony, the implementation of separate filings regulated in Articles 141 and 142 of the Criminal Procedure Code has stated that investigators are splitting through the instructions of the public prosecutor, obstacles and solutions regarding separate filing what the investigator does is that there are internal and external constraints and solutions to overcome these obstacles, namely improving the capacity of the Police resources by providing training and evaluation and establishing cooperative relationships with other agencies.

Keywords: *splitsing, traffic control, investigator*